

**Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan di Situs
Website Pemerintah Daerah**

(Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia tahun 2021)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang



Oleh:

FEBRINA SABRINI

BP/NIM: 2018/18043092

DEPARTEMEN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan di Situs Website Pemerintah
Daerah**

(Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia tahun 2021)

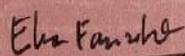
Nama : Febrina Sabrini
NIM / TM : 18043092 / 2018
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, 13 Mei 2024

Disetujui Oleh

Ketua Departemen Akuntansi

Pembimbing



Dr. Eka Fauzibardani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710522 200003 2 001



Vita Fitria Sari, SE., M.Si
NIP. 19870515 201012 2 009

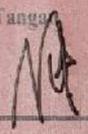
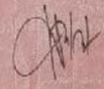
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan di Situs
Website Pemerintah Daerah (*Studi Kasus Pemerintah Daerah
Tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia Tahun 2021*)
Nama : Febrina Sabrini
NIM / TM : 18043092 / 2018
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, 13 Mei 2024

Tim Penguji:

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	<u>Vita Fitria Sari, SE., M.Si</u>	1. 
2	Anggota	<u>Mavar Afriventi, SE., M.Sc</u>	2. 
3	Anggota	<u>Herlina Helmy, SE., Ak., M.SAk</u>	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febrina Sabrini
NIM/Tahun Masuk : 18043092/2018
Tempat/Tgl. Lahir : Perawang/ 8 Februari 2000
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : BTN KOPKAR Jl.2 No 8 RT/RW 004/004, Kel/Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang
No. HP/Telp : 081374459182
Judul Skripsi : **Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan di Situs Website Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia tahun 2021)**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 13 Mei 2024
Saya yang Menyatakan



Febrina Sabrini
18043092/2018

ABSTRAK

Febrina Sabrini (2018/18043092) : Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Dan Tindak Lanjut Hasil Pemriksaan Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan di Situs Website Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Se-Indonesia 2021)

Dosen Pembimbing : Vita Fitria Sari, SE, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan laporan keuangan di situs website pemerintah daerah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan populasi ini diperoleh sebanyak 542 Kabupaten/Kota se Indonesia pada tahun 2021 yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan yaitu regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel opini audit dan temuan audit berpengaruh positif terhadap ketersediaan laporan keuangan di situs website pemerintah daerah. Variabel tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap ketersediaan laporan keuangan di situs website pemerintah daerah.

Kata kunci: Ketersediaan Laporan Keuangan, Opini Audit, Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan di Situs Website Pemerintah Daerah”** ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada manusia yang paling cerdas dan mulia, yang telah berjuang menghapus kebodohan dipermukaan bumi ini, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini merupakan hasil penelitian untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi S1 pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis menerima bantuan dan semangat dari berbagai pihak tertentu, baik berupa moril maupun materil. Untuk ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Mayar Afriyenti, SE., M.Sc sebagai Pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Dosen Penguji 1 yang telah memberikan arahan dan sarannya dalam skripsi ini.
3. Ibu Herlina Helmy, SE. M. Sak sebagai Dosen Penguji 2 yang telah memberikan arahan dan sarannya dalam skripsi ini.
4. Ibu Dr. Eka Fauzihardani, SE, M.Si. Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang untuk semua kebijakan yang sudah ditetapkan.
5. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
6. Abang Rizki selaku admin prodi akuntansi yang sudah mempermudah segala urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

7. Teristimewa untuk Mama Lismawati dan Papa Betrizal Afni, Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras serta mendidik, tidak berhenti memberi semangat, serta do'a yang selalu mengiringi langkah febi sehingga febi bisa menyelesaikan program studi sampai selesai.
8. Kakak tercinta indah intra sagita, abang Riyandi, keponakan tersayang Annisa dan Aisyah. Terimakasih atas dukungan, Semangat serta memberikan doa dan kasih sayang yang luar biasa.
9. Anabul kesayangan Elang, Uci, Pino, Iboy dan Peli terimakasih sudah menemani setiap hari dan menghibur dalam kesedihan
10. Sahabat saya Chintia Wirandia Putri dan Fadhilatul Husna terima kasih support maupun kebersamaannya dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan terakhir terimakasih untuk diri sendiri, Febrina Sabrini karena telah mampu berusaha kerja keras berjuang sejauh ini tidak menyerah dan terus berusaha sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Namun penulis menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini dari berbagai pihak. Semoga dengan bimbingan, dukungan, arahan dan masukan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Padang, 21 Februari 2024

Febrina Sabrini
NIM. 18043092

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN TEORI	16
A. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	16
B. Good Public Governance dan E- Government.....	18
C. Ketersediaan Sukarela Laporan Keuangan pada Situs <i>Website</i> Pemerintah Daerah	21
D. Opini Audit.....	24
E. Temuan Audit.....	26
F. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	26
G. Penelitian Terdahulu	27
H. Pengembangan Hipotesis	31
1. Pengaruh Opini Audit terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan Situs <i>Website</i> Pemerintah Daerah.	31
2. Pengaruh Temuan Audit terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan Situs <i>Website</i> Pemerintah Daerah	32
3. Pengaruh Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan Situs <i>Website</i> Pemerintah Daerah.....	34
I. Kerangka Konseptual.....	35

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel.....	37
1. Populasi	37
2. Sampel	38
C. Jenis dan Sumber Data.....	38
D. Metode Pengumpulan Data.....	39
E. Variabel Penelitian.....	39
F. Defenisi Operasional dan pengukuran variabel	40
G. Metode Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	49
A. Gambaran Umum Penelitian.....	49
B. Hasil Analisis Data.....	49
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	49
2. Uji Asumsi Klasik	51
3. Uji Model Penelitian.....	52
4. Koefisien Determinasi (Mc Fadden R-Squaread)	55
5. Analisis Regresi Logistik.....	56
6. Uji Hipotesis	57
C. Pembahasan.....	59
1. Pengaruh Opini Audit Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan Di Situs Website Pemerintah Daerah di Indonesia.	59
2. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan Di Situs Website Pemerintah Daerah di Indonesia.	60
3. Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan Di Situs Website Pemerintah Daerah di Indonesia.	62
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Keterbatasan Penelitian.....	64
C. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif	49
Tabel 4. 2 Uji Multikolinearitas	52
Tabel 4. 3 Hasil Uji Kelayakan Model.....	53
Tabel 4. 4 Iteration History 0	54
Tabel 4. 5 Iteration History 1	54
Tabel 4. 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	55
Tabel 4. 7 Uji Regresi Logistik	56
Tabel 4. 8 Uji T	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	36
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabulasi Variabel Opini Audit	73
Lampiran 2. Tabulasi Variabel Temuan Audit	86
Lampiran 3. Tabulasi Variabel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	99
Lampiran 4. Tabulasi Variabel Ketersediaan Laporan Keuangan di Situs Website Pemerintah Daerah	112
Lampiran 5. Hasil Analisis Statistik Deskriptif	125
Lampiran 6. Hasil Uji Asumsi Klasik (uji multikolinearitas)	125
Lampiran 7. Hasil Uji Model Penelitian	126
Lampiran 8. Hasil Koefisien Determinasi (<i>Mc Fadden R-Squaread</i>).....	127
Lampiran 9. Hasil Analisis Regresi Logistik	127
Lampiran 10. Hasil Uji Parsial (Uji T).....	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi telah merubah cara kita menjalani keseharian, termasuk dalam hal bagaimana masyarakat memperoleh informasi dari pemerintah daerah. Pesatnya pertumbuhan teknologi dan sistem informasi sangat mempengaruhi sektor pemerintahan Indonesia yang diidentifikasi adanya berbasis elektronik (*e-government*) (Alwi, Kholida dan Bachtiar, 2014). Perkembangan dapat memajukan pemerintah daerah di Indonesia agar lebih transparan dalam menetapkan laporan keuangan di *website* pemerintah yang dikenal dengan *e-government*. Ketersediaan informasi keuangan dan non keuangan di *website* yang ditetapkan pemerintahan dalam mendukung pemerintah daerah untuk mengirimkan informasi dengan cepat, lancar dan murah (Nor et al., 2019).

Audit adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriterianya. Audit hendaknya dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen (Arens, 2003). Audit keuangan secara umum dilaksanakan oleh auditor ekstern. Namun demikian, sesuai tujuan pelaksanaannya, auditor intern juga dapat melakukan audit keuangan (atau lebih tepat disebut reviu laporan keuangan). Namun perlu diingat bahwa tujuan pelaksanaan reviu intern bukan memberikan opini/pendapat atas penyajian laporan keuangan. Jika audit keuangan dilaksanakan sebagai

penugasan audit ekstern, maka titik berat auditnya adalah pada tujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran informasi keuangan. Sebagai contoh, audit keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah oleh BPK adalah untuk memberikan pendapat/opini tentang kesesuaian penyajian laporan keuangan pemerintah dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Jika audit keuangan dilaksanakan sebagai penugasan audit intern, maka titik beratnya adalah pada tujuan untuk menentukan keakuratan dan keandalan informasi keuangan.

Menurut (Pérez et al., 2008; Styles & Tennyson, 2007) bagi pemerintah saat ini internet merupakan media yang paling mudah dijangkau dan paling *cost effective* terhadap pemerintah daerah dalam menyajikan informasi tentang pengelolaan keuangan serta layanan terhadap pemerintah yang transparan dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Penggunaan *website* sebagai media untuk ketersediaan informasi keuangan yang mana dianggap efektif dan efisien sebagai langkah untuk meningkatkan pengendalian terhadap pemerintah daerah supaya terhindar dari tindakan korupsi serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah (Bertot et al., 2010). Jadi dapat kita lihat bahwa penggunaan *website* bagi pemerintahan daerah untuk menyediakan laporan keuangannya memiliki dampak positif bagi masyarakat dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet.

Di Indonesia, akses informasi di situs *website* pemerintah daerah masih bersifat sukarela (*voluntary*). Oleh karena itu, ketersediaan informasi berbeda-

beda pada setiap *website* pemda. Menurut ((Trisnawati, 2020), hal ini terbukti hanya beberapa pemerintah daerah telah menggunakan internet sebagai media pelaporan keuangan dan mencatat bahwa tidak semua pemerintah daerah mempublikasikan laporan keuangan secara komprehensif. Menurut Forum Transparansi Anggaran Indonesia, sebagian besar pemerintah daerah belum menerapkan ketersediaan pengelolaan anggaran di *website* resmi, karena ketersediaan data keuangan diperoleh via internet masih bersifat sukarela dan belum memiliki sanksi mewajibkan (Nosihana, Ariefia dan Yaya, 2016). Karena tidak ada sanksi mewajibkan terkait belum diungkapkannya informasi keuangan, hal ini menyebabkan penggunaan situs yang tidak efisien dalam upaya untuk menjadi lebih transparan.

Selanjutnya kasus dari komisi informasi pusat mencatat selama 2021 terdapat kenaikan ketersediaan informasi dari badan publik dibandingkan dengan tahun lalu, namun masih banyak badan publik yang belum terbuka. Data pada capaian informatif menunjukkan pada tahun 2021 meningkat jadi 24,63% dari sebelumnya 17% pada tahun 2020. Selain transparansi anggaran, dalam OBS 2022 (*Open Budget Survey*) menampilkan aspek transparansi publik dan pengawasan anggaran (*Budget Oversight*), dimana nilai partisipasi publik dalam tahun 2021 mencapai skor 24 dan *budget oversight* terdapat nilai 61 (<https://anggaran.kemenkeu.go.id>).

Disamping masalah tersebut tingkat pengguna internet di Indonesia berdasarkan hasil survey dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet (APJII) tahun 2021-2022 mencapai 77,02%, di mana ada

210.026.769 jiwa dari total 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia yang terhubung ke internet pada tahun 2021-2022. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ada lonjakan penetrasi internet di tanah air, Misalnya pada tahun 2018 sebesar 64,80% yang kemudian terus tumbuh di 2019-2020 dengan penetrasi internetnya 73,70%, angka tersebut setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Tingginya tingkat penggunaan internet yang di daerah menyebabkan tingginya tekanan dari masyarakat akan ketersediaan informasi keuangan melalui internet. Berdasarkan data tersebut, hal ini menunjukkan bahwa ada tekanan pada pemerintah untuk dapat secara teratur mengungkapkan informasi keuangan melalui internet untuk memastikan transparansi dalam operasi pemerintah. Namun, pemerintah belum meningkatkan penggunaan situs *web* sebagai sarana komunikasi informasi keuangan tentang pengelolaan sumber daya (Sofyani & Dwirama, 2021).

Dari beberapa penjelasan ketersediaan laporan keuangan diatas, terlihat jelas bahwa ketersediaan laporan di situs *website* merupakan masalah yang kompleks dan sulit untuk dihilangkan. Ketersediaan laporan keuangan pemerintah daerah di *website* bersifat sukarela membuat kesenjangan dalam praktik keterbukaan informasi keuangan melalui e-government dan sebagian besar pemerintah daerah belum mengoptimalkan penggunaan teknologi internet (Verawaty, 2015).

Kinerja pemerintah digambarkan dengan tingkat pencapaian tujuan instansi pemerintah yakni tercapainya visi, misi dan strategi pemerintah daerah sebagai indikator tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam

melaksanakan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kinerja pemerintah daerah dapat dikategorikan baik jika dalam melaksanakan program dan kebijakan pemerintah dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan (Puspitasari, 2020). Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan diteliti pada penelitian yaitu opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Tujuan utama dari program kerja pemerintah daerah adalah memberikan fasilitas yang terbaik untuk masyarakat. Agar dapat memberikan pelayanan yang baik, maka harus didukung oleh pengelolaan aset yang baik pula. Oleh karena itu diperlukan adanya sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah yang memiliki ukuran besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang kecil ukurannya (Harumiati et al., 2014).

Menurut (Sahmuddin., 2008) berdasarkan teori agensi (*agency theory*), akuntabilitas publik yang dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang saham (*agent*) dengan upaya pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas maupun kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Transparansi dan akuntabilitas sangatlah diperlukan untuk menghindari adanya tindak manipulasi ataupun penyalahgunaan wewenang oleh

pemerintah daerah dalam penyajian informasi kepada publik. Selain itu, jika dikaitkan dengan teori Agensi, pemerintah daerah merupakan agent karena menyelenggarakan tanggungjawab pemerintahan sesuai dengan segala kepentingan masyarakat selaku principal (Wau dan Ratmono, 2015). Transparansi dan akuntabilitas kepada publik ini diatur dalam sebuah regulasi yaitu UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut UU tersebut, informasi publik yang wajib diumumkan oleh badan publik diantaranya yaitu informasi yang berkaitan dengan badan publik, kegiatan dan kinerja badan publik, laporan keuangan, dan informasi lainnya.

Implikasi dari teori agensi terhadap penelitian ini adalah dapat menjelaskan Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya dengan melibatkan sejumlah aturan yaitu Standar Akuntansi Pemerintah sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan dimana Pemerintah Daerah mampu menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat yang memenuhi syarat keterandalan yaitu penyajian jujur, dapat diverifikasi dan netralitas.

Aspek pengelolaan keuangan menjadi ranah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan keuangan daerah termasuk unsur dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah suatu pemda yang tidak dapat dipisahkan sehingga diperlukan pengendalian serta pengawasan

yang baik agar tidak terjadi kecurangan (Sudarsana & Rahardjo, 2013). Di Indonesia, pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal ini berkaitan dengan salah satu hasil pemeriksaan BPK yakni pemeriksaan kinerja yang didalamnya ketersediaan opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara sukarela melalui *website* tergantung dari urgensi masing-masing pemerintah daerah, dengan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi ketersediaan informasi pada situs *website* pemerintah. Pertama yaitu opini audit. Opini audit adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum (Mulyadi, 2013).

Menurut (Prasasti et al., 2017), opini audit menyediakan informasi yang sesuai dengan pengguna informasi, dalam pemerintah sendiri wajib memahami kinerja, evaluasi, masyarakat serta investor untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Oleh sebab itu, opini audit menjadi salah satu indikator yang penting bagi kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. Jika terjadi penyimpangan yang ditemukan oleh BPK melalui pemeriksaannya, akan mempengaruhi ketersediaan laporan keuangan dan pemerintah daerah dengan ketetapan hasil audit yang buruk akan menyebabkan laporan keuangan belum tersedia di *website* resmi (Handayani, 2010). Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 opini audit menyatakan,

profesional auditor tentang keakuratan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Ketersediaan informasi laporan keuangan di *website* resmi pemerintah daerah yang dilihat berdasarkan informasi keuangan maupun non keuangan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) akan cenderung mengungkapkan ketersediaan informasi keuangan pemerintah daerah melalui internet untuk memberikan sinyal pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik dan bisa dipertanggung jawabkan (Agustina, U., 2017). Jika pemerintah daerah memperoleh opini audit selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan menimbulkan anggapan bahwasanya dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah terjadi penyimpangan, terjadi penyimpangan sehingga pemerintah daerah cenderung untuk menutupi informasi keuangan dari publik.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wau & Ratmono, 2015) dan (R. P. Nurhidayati & Rahayu, 2020) menunjukkan pengaruh *Internet Financial Reporting* (IFR) dengan memasukkan faktor opini audit dapat diperoleh hubungan positif terhadap ketersediaan informasi keuangan di internet dan menyatakan bahwa pemerintah akan memperlihatkan sinyal pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bertanggung jawab dengan mempublikasikan laporan keuangannya yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian di internet. Namun pada penelitian (Rahayu et al., 2021) hal ini tidak sejalan dengan hasil yang diperoleh karena hasil audit tidak memiliki

hubungan signifikan terhadap transparansi keuangan daerah melalui *website* resmi pemerintah daerah.

Selanjutnya (N. L. Khasanah & Rahardjo, 2014) menunjukkan bahwa jumlah temuan audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketersediaan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan audit merupakan kumpulan informasi dan fakta mengenai situasi yang telah diperiksa dan dianalisis terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada laporan keuangan pemerintah daerah (ISO 9000:2008). Apabila Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak hal yang tidak wajar saat menginspeksi laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut dianggap tidak memadai. Apabila situasi semacam ini terwujud, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan dengan cepat meminta pemerintah daerah tersebut untuk memperbaiki dan meningkatkan tingkat keterbukaan sebagai langkah perbaikan terhadap ketersediaan laporan keuangan yang dipresentasikan. Hal ini menunjukkan bahwa temuan audit memiliki dampak yang menguntungkan dan penting terhadap tingkat ketersediaan laporan keuangan pemerintah daerah di *website* (Kinerja & Tengah, 2022). Dengan banyaknya temuan audit, pemda menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dengan melakukan koreksi dalam upaya meningkatkan pengungkapan pelaporan keuangan.

Penelitian sebelumnya terkait variabel temuan audit yaitu (Liestiani, 2008) menunjukkan bahwa jumlah temuan audit dan nilai temuan sebagai salah satu yang mempengaruhi pengungkapan. Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan laporan keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan positif dengan jumlah temuan audit. Hal ini membuktikan teori yang mengatakan bahwa pemerintah daerah akan memenuhi rekomendasi yang diberikan oleh BPK untuk melakukan perbaikan yang meningkatkan pengungkapan pada laporan keuangannya (Saputra, 2012). Sebaiknya, nilai temuan memiliki hubungan negative dengan pengungkapan laporan keuangan daerah. Hasil ini membuktikan hipotesis yang dibuat yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat penyimpangan, maka pemerintah daerah cenderung untuk menutupi penyimpangan tersebut, maka tingkat ketersediaan laporan keuangan untuk di akses di *website* menjadi rendah.

Selanjutnya menurut penelitian (Laporan & Pemerintah, n.d.) menjelaskan bahwa jumlah temuan audit tidak berdampak signifikan bagi tingkat ketersediaan karena jumlah temuan audit BPK tidak serta merta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan lebih besar. Dalam terjadinya pertentangan atas hasil penelitian, dan adanya ketidakkonsistenan hasil atas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketersediaan laporan keuangan, serta telah munculnya peraturan baru tentang Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010, maka dibutuhkan penelitian lanjutan guna menguji ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut.

Kemudian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK wajib dilakukan dengan menunjukkan ketersediaan dari hasil kajian efektif jika rekomendasi dilaksanakan oleh pimpinan entitas yang diperiksa (Dwiputrianti, 2008).

Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Pengambilan keputusan dapat menghentikan dan mencegah terulangnya kesalahan, penyimpangan, kecurangan dan pemborosan dengan masukan dari auditor (Umar, 2012). Koreksi pasca audit merupakan bentuk pertanggungjawaban kementerian/lembaga atas kesalahan dalam pertanggungjawaban keuangan publik (Liu & Lin, 2012).

Di samping itu, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan terhadap peraturan resmi, selain itu mereka juga bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara dan mengawasi hasil dari pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Periksa Keuangan (BPK) (Dasar et al., 1945). Kecepatan pemerintah daerah dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang di audit bertentangan pada keinginan untuk mengungkapkan ketersediaan pelaporan keuangan di *website* pemerintah, sebagai upaya perbaikan pemerintah daerah dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Masyitoh 2014), hal ini menunjukkan bahwa semakin luas pengawasan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, semakin lemah persepsi korupsi yang ada. Pada laporan hasil pemeriksaan dimana BPK masih menemukan sejumlah masalah dalam pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan diminta untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait temuan audit sebagai bentuk

tingkat penyajian dalam ketersediaan informasi pada pemerintah daerah kepada laporan keuangan (Ridwan & Yahya, 2020).

Meninjau dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kembali dan menguji lebih lanjut faktor yang mengendalikan ketersediaan informasi pada web resmi pemerintah daerah. Penelitian ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mengetahui peran ketepatan waktu dalam ketersediaan laporan keuangan di *website* yang berkualitas dan perkembangan *e-government* di Indonesia. Penelitian ini juga akan memfokuskan meneliti laporan keuangan pemda kabupaten/kota di Indonesia yang terdapat dalam badan pemeriksa keuangan (BPK). Penelitian ini memakai data yaitu pada tahun 2021, ketika penggunaan komunikasi data meningkat pesat. Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) tahun 2010 pada (Liqoana, 2016) menjelaskan bahwa konten *website* pemda minimal harus menampilkan sekilas pemerintah daerah, berita serta forum diskusi, dan saran/komentar.

Dari penjelasan diatas perbedaan penelitian sebelumnya adalah peneliti memperluas sampel penelitian oleh (Fatmawati et al., 2019) dengan sampel penelitian kabupaten/kota di Pulau Jawa menjadi seluruh kabupaten/kota di Indonesia, hal ini dimaksudkan agar lebih representatif atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan tambahan variabel independen yaitu variabel opini audit dan perbedaan waktu dalam penelitian serta kondisi karakteristik masing-masing di pemerintah daerah. Variabel opini audit sebagai hasil salah satu

pemeriksaan oleh BPK yang menunjukkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah (Pauli, 2015). Perolehan opini audit dari BPK RI berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mengisyaratkan kinerja pemerintah daerah yang baik.

Penelitian ini menggunakan tahun 2021 untuk melihat pengaruh opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan laporan keuangan. Hal ini karena laporan keuangan audit setiap periode kemudian diterbitkan pada tahun berikutnya. Penggunaan periode penelitian tahun 2021 disebabkan karena adanya batasan perolehan data untuk menguji variabel ketersediaan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang pentingnya ketersediaan laporan keuangan pemerintah daerah di situs *website* serta memberikan saran seperti faktor-faktor yang mempengaruhi agar hasil ketersediaan laporan keuangan secara sukarela dapat terwujud, pada *website* pemerintah daerah dengan sifat tanggung jawab dan good government governance dapat dilaksanakan. Karena itu, berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai **“Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan di Situs Website Pemerintah Daerah (studi pemerintah daerah kabupaten/kota se Indonesia tahun 2021)”**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh opini audit terhadap ketersediaan laporan keuangan di situs *website* pemerintah daerah di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh temuan audit terhadap ketersediaan laporan keuangan di situs *website* pemerintah daerah di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh tindaklanjut hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan laporan keuangan disitus *website* pemerintah daerah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia dan sejauh mana pengaruhnya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah memberikan masukan yang bermanfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta wawasan dorongan ke arah yang lebih baik, mampu meningkatkan pemahaman dan menyadari pentingnya penyajian terkait dengan

pengaruh terhadap ketersediaan laporan keuangan di situs *website*. Selain itu, bagi penelitian lain dapat disajikan bahan perbandingan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat pemikiran kepada :

- a. Bagi akademisi sebagai bahan referensi dalam penelitian berikutnya, dan penelitian diperlukan dapat membagikan tambahan serta referensi bagi peneliti lain yang tertarik dengan keahlian dalam penelitian ini.
- b. Bagi pemerintah pusat sebagai pengguna standar akuntansi pemerintah, sebaiknya hasil penelitian ini disajikan sebagai acuan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan.
- c. Bagi pemerintah daerah sebagai pengguna standar akuntansi publik, hasil penelitian ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akuntansi untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.
- d. Bagi Masyarakat

Peneliti mengharapkan hasil penelitian bisa memberikan manfaat bagi masyarakat mengenai bagaimana hasil dari pemeriksaan yang dilaksanakan pihak BPK RI dan juga dapat menambah minat masyarakat untuk mempelajari system akuntansi dan teknologi.

**Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan di Situs
Website Pemerintah Daerah**
(Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia tahun 2021)

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

FEBRINA SABRINI

BP/NIM: 2018/18043092

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan di Situs Website Pemerintah
Daerah**

(Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia tahun 2021)

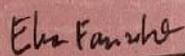
Nama : Febrina Sabrini
NIM / TM : 18043092 / 2018
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, 13 Mei 2024

Disetujui Oleh

Ketua Departemen Akuntansi

Pembimbing



Dr. Eka Fauzibardani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710522 200003 2 001

Vita Fitria Sari, SE., M.Si
NIP. 19870515 201012 2 009

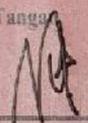
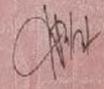
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan di Situs
Website Pemerintah Daerah (*Studi Kasus Pemerintah Daerah
Tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia Tahun 2021*)
Nama : Febrina Sabrini
NIM / TM : 18043092 / 2018
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, 13 Mei 2024

Tim Penguji:

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	<u>Vita Fitria Sari, SE., M.Si</u>	1. 
2	Anggota	<u>Mavar Afriventi, SE., M.Sc</u>	2. 
3	Anggota	<u>Herlina Helmy, SE., Ak., M.SAk</u>	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febrina Sabrini
NIM/Tahun Masuk : 18043092/2018
Tempat/Tgl. Lahir : Perawang/ 8 Februari 2000
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : BTN KOPKAR Jl.2 No 8 RT/RW 004/004, Kel/Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang
No. HP/Telp : 081374459182
Judul Skripsi : **Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan di Situs Website Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia tahun 2021)**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 13 Mei 2024
Saya yang Menyatakan



Febrina Sabrini
18043092/2018

ABSTRAK

Febrina Sabrini (2018/18043092) : Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Dan Tindak Lanjut Hasil Pemriksaan Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan di Situs Website Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Se-Indonesia 2021)

Dosen Pembimbing : Vita Fitria Sari, SE, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan laporan keuangan di situs website pemerintah daerah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan populasi ini diperoleh sebanyak 542 Kabupaten/Kota se Indonesia pada tahun 2021 yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan yaitu regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel opini audit dan temuan audit berpengaruh positif terhadap ketersediaan laporan keuangan di situs website pemerintah daerah. Variabel tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap ketersediaan laporan keuangan di situs website pemerintah daerah.

Kata kunci: Ketersediaan Laporan Keuangan, Opini Audit, Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan di Situs Website Pemerintah Daerah”** ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada manusia yang paling cerdas dan mulia, yang telah berjuang menghapus kebodohan dipermukaan bumi ini, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini merupakan hasil penelitian untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi S1 pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis menerima bantuan dan semangat dari berbagai pihak tertentu, baik berupa moril maupun materil. Untuk ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Mayar Afriyenti, SE., M.Sc sebagai Pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Dosen Penguji 1 yang telah memberikan arahan dan sarannya dalam skripsi ini.
3. Ibu Herlina Helmy, SE. M. Sak sebagai Dosen Penguji 2 yang telah memberikan arahan dan sarannya dalam skripsi ini.
4. Ibu Dr. Eka Fauzihardani, SE, M.Si. Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang untuk semua kebijakan yang sudah ditetapkan.
5. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
6. Abang Rizki selaku admin prodi akuntansi yang sudah mempermudah segala urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

7. Teristimewa untuk Mama Lismawati dan Papa Betrizal Afni, Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras serta mendidik, tidak berhenti memberi semangat, serta do'a yang selalu mengiringi langkah febi sehingga febi bisa menyelesaikan program studi sampai selesai.
8. Kakak tercinta indah intra sagita, abang Riyandi, keponakan tersayang Annisa dan Aisyah. Terimakasih atas dukungan, Semangat serta memberikan doa dan kasih sayang yang luar biasa.
9. Anabul kesayangan Elang, Uci, Pino, Iboy dan Peli terimakasih sudah menemani setiap hari dan menghibur dalam kesedihan
10. Sahabat saya Chintia Wirandia Putri dan Fadhilatul Husna terima kasih support maupun kebersamaannya dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan terakhir terimakasih untuk diri sendiri, Febrina Sabrini karena telah mampu berusaha kerja keras berjuang sejauh ini tidak menyerah dan terus berusaha sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Namun penulis menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini dari berbagai pihak. Semoga dengan bimbingan, dukungan, arahan dan masukan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Padang, 21 Februari 2024

Febrina Sabrini
NIM. 18043092

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN TEORI	16
A. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	16
B. Good Public Governance dan E- Government.....	18
C. Ketersediaan Sukarela Laporan Keuangan pada Situs <i>Website</i> Pemerintah Daerah	21
D. Opini Audit.....	24
E. Temuan Audit.....	26
F. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	26
G. Penelitian Terdahulu	27
H. Pengembangan Hipotesis	31
1. Pengaruh Opini Audit terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan Situs <i>Website</i> Pemerintah Daerah.	31
2. Pengaruh Temuan Audit terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan Situs <i>Website</i> Pemerintah Daerah	32
3. Pengaruh Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan Situs <i>Website</i> Pemerintah Daerah.....	34
I. Kerangka Konseptual.....	35

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel.....	37
1. Populasi	37
2. Sampel	38
C. Jenis dan Sumber Data.....	38
D. Metode Pengumpulan Data.....	39
E. Variabel Penelitian.....	39
F. Defenisi Operasional dan pengukuran variabel	40
G. Metode Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	49
A. Gambaran Umum Penelitian.....	49
B. Hasil Analisis Data.....	49
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	49
2. Uji Asumsi Klasik	51
3. Uji Model Penelitian.....	52
4. Koefisien Determinasi (Mc Fadden R-Squaread)	55
5. Analisis Regresi Logistik.....	56
6. Uji Hipotesis	57
C. Pembahasan.....	59
1. Pengaruh Opini Audit Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan Di Situs Website Pemerintah Daerah di Indonesia.	59
2. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan Di Situs Website Pemerintah Daerah di Indonesia.	60
3. Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan Di Situs Website Pemerintah Daerah di Indonesia.	62
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Keterbatasan Penelitian.....	64
C. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif	49
Tabel 4. 2 Uji Multikolinearitas	52
Tabel 4. 3 Hasil Uji Kelayakan Model.....	53
Tabel 4. 4 Iteration History 0	54
Tabel 4. 5 Iteration History 1	54
Tabel 4. 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	55
Tabel 4. 7 Uji Regresi Logistik	56
Tabel 4. 8 Uji T	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	36
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabulasi Variabel Opini Audit	73
Lampiran 2. Tabulasi Variabel Temuan Audit	86
Lampiran 3. Tabulasi Variabel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	99
Lampiran 4. Tabulasi Variabel Ketersediaan Laporan Keuangan di Situs Website Pemerintah Daerah	112
Lampiran 5. Hasil Analisis Statistik Deskriptif	125
Lampiran 6. Hasil Uji Asumsi Klasik (uji multikolinearitas)	125
Lampiran 7. Hasil Uji Model Penelitian	126
Lampiran 8. Hasil Koefisien Determinasi (<i>Mc Fadden R-Squaread</i>).....	127
Lampiran 9. Hasil Analisis Regresi Logistik	127
Lampiran 10. Hasil Uji Parsial (Uji T).....	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi telah merubah cara kita menjalani keseharian, termasuk dalam hal bagaimana masyarakat memperoleh informasi dari pemerintah daerah. Pesatnya pertumbuhan teknologi dan sistem informasi sangat mempengaruhi sektor pemerintahan Indonesia yang diidentifikasi adanya berbasis elektronik (*e-government*) (Alwi, Kholida dan Bachtiar, 2014). Perkembangan dapat memajukan pemerintah daerah di Indonesia agar lebih transparan dalam menetapkan laporan keuangan di *website* pemerintah yang dikenal dengan *e-government*. Ketersediaan informasi keuangan dan non keuangan di *website* yang ditetapkan pemerintahan dalam mendukung pemerintah daerah untuk mengirimkan informasi dengan cepat, lancar dan murah (Nor et al., 2019).

Audit adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriterianya. Audit hendaknya dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen (Arens, 2003). Audit keuangan secara umum dilaksanakan oleh auditor ekstern. Namun demikian, sesuai tujuan pelaksanaannya, auditor intern juga dapat melakukan audit keuangan (atau lebih tepat disebut reviu laporan keuangan). Namun perlu diingat bahwa tujuan pelaksanaan reviu intern bukan memberikan opini/pendapat atas penyajian laporan keuangan. Jika audit keuangan dilaksanakan sebagai

penugasan audit ekstern, maka titik berat auditnya adalah pada tujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran informasi keuangan. Sebagai contoh, audit keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah oleh BPK adalah untuk memberikan pendapat/opini tentang kesesuaian penyajian laporan keuangan pemerintah dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Jika audit keuangan dilaksanakan sebagai penugasan audit intern, maka titik beratnya adalah pada tujuan untuk menentukan keakuratan dan keandalan informasi keuangan.

Menurut (Pérez et al., 2008; Styles & Tennyson, 2007) bagi pemerintah saat ini internet merupakan media yang paling mudah dijangkau dan paling *cost effective* terhadap pemerintah daerah dalam menyajikan informasi tentang pengelolaan keuangan serta layanan terhadap pemerintah yang transparan dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Penggunaan *website* sebagai media untuk ketersediaan informasi keuangan yang mana dianggap efektif dan efisien sebagai langkah untuk meningkatkan pengendalian terhadap pemerintah daerah supaya terhindar dari tindakan korupsi serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah (Bertot et al., 2010). Jadi dapat kita lihat bahwa penggunaan *website* bagi pemerintahan daerah untuk menyediakan laporan keuangannya memiliki dampak positif bagi masyarakat dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet.

Di Indonesia, akses informasi di situs *website* pemerintah daerah masih bersifat sukarela (*voluntary*). Oleh karena itu, ketersediaan informasi berbeda-

beda pada setiap *website* pemda. Menurut ((Trisnawati, 2020), hal ini terbukti hanya beberapa pemerintah daerah telah menggunakan internet sebagai media pelaporan keuangan dan mencatat bahwa tidak semua pemerintah daerah mempublikasikan laporan keuangan secara komprehensif. Menurut Forum Transparansi Anggaran Indonesia, sebagian besar pemerintah daerah belum menerapkan ketersediaan pengelolaan anggaran di *website* resmi, karena ketersediaan data keuangan diperoleh via internet masih bersifat sukarela dan belum memiliki sanksi mewajibkan (Nosihana, Ariefia dan Yaya, 2016). Karena tidak ada sanksi mewajibkan terkait belum diungkapkannya informasi keuangan, hal ini menyebabkan penggunaan situs yang tidak efisien dalam upaya untuk menjadi lebih transparan.

Selanjutnya kasus dari komisi informasi pusat mencatat selama 2021 terdapat kenaikan ketersediaan informasi dari badan publik dibandingkan dengan tahun lalu, namun masih banyak badan publik yang belum terbuka. Data pada capaian informatif menunjukkan pada tahun 2021 meningkat jadi 24,63% dari sebelumnya 17% pada tahun 2020. Selain transparansi anggaran, dalam OBS 2022 (*Open Budget Survey*) menampilkan aspek transparansi publik dan pengawasan anggaran (*Budget Oversight*), dimana nilai partisipasi publik dalam tahun 2021 mencapai skor 24 dan *budget oversight* terdapat nilai 61 (<https://anggaran.kemenkeu.go.id>).

Disamping masalah tersebut tingkat pengguna internet di Indonesia berdasarkan hasil survey dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet (APJII) tahun 2021-2022 mencapai 77,02%, di mana ada

210.026.769 jiwa dari total 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia yang terhubung ke internet pada tahun 2021-2022. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ada lonjakan penetrasi internet di tanah air, Misalnya pada tahun 2018 sebesar 64,80% yang kemudian terus tumbuh di 2019-2020 dengan penetrasi internetnya 73,70%, angka tersebut setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Tingginya tingkat penggunaan internet yang di daerah menyebabkan tingginya tekanan dari masyarakat akan ketersediaan informasi keuangan melalui internet. Berdasarkan data tersebut, hal ini menunjukkan bahwa ada tekanan pada pemerintah untuk dapat secara teratur mengungkapkan informasi keuangan melalui internet untuk memastikan transparansi dalam operasi pemerintah. Namun, pemerintah belum meningkatkan penggunaan situs *web* sebagai sarana komunikasi informasi keuangan tentang pengelolaan sumber daya (Sofyani & Dwirama, 2021).

Dari beberapa penjelasan ketersediaan laporan keuangan diatas, terlihat jelas bahwa ketersediaan laporan di situs *website* merupakan masalah yang kompleks dan sulit untuk dihilangkan. Ketersediaan laporan keuangan pemerintah daerah di *website* bersifat sukarela membuat kesenjangan dalam praktik keterbukaan informasi keuangan melalui e-government dan sebagian besar pemerintah daerah belum mengoptimalkan penggunaan teknologi internet (Verawaty, 2015).

Kinerja pemerintah digambarkan dengan tingkat pencapaian tujuan instansi pemerintah yakni tercapainya visi, misi dan strategi pemerintah daerah sebagai indikator tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam

melaksanakan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kinerja pemerintah daerah dapat dikategorikan baik jika dalam melaksanakan program dan kebijakan pemerintah dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan (Puspitasari, 2020). Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan diteliti pada penelitian yaitu opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Tujuan utama dari program kerja pemerintah daerah adalah memberikan fasilitas yang terbaik untuk masyarakat. Agar dapat memberikan pelayanan yang baik, maka harus didukung oleh pengelolaan aset yang baik pula. Oleh karena itu diperlukan adanya sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah yang memiliki ukuran besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang kecil ukurannya (Harumiati et al., 2014).

Menurut (Sahmuddin., 2008) berdasarkan teori agensi (*agency theory*), akuntabilitas publik yang dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang saham (*agent*) dengan upaya pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas maupun kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Transparansi dan akuntabilitas sangatlah diperlukan untuk menghindari adanya tindak manipulasi ataupun penyalahgunaan wewenang oleh

pemerintah daerah dalam penyajian informasi kepada publik. Selain itu, jika dikaitkan dengan teori Agensi, pemerintah daerah merupakan agent karena menyelenggarakan tanggungjawab pemerintahan sesuai dengan segala kepentingan masyarakat selaku principal (Wau dan Ratmono, 2015). Transparansi dan akuntabilitas kepada publik ini diatur dalam sebuah regulasi yaitu UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut UU tersebut, informasi publik yang wajib diumumkan oleh badan publik diantaranya yaitu informasi yang berkaitan dengan badan publik, kegiatan dan kinerja badan publik, laporan keuangan, dan informasi lainnya.

Implikasi dari teori agensi terhadap penelitian ini adalah dapat menjelaskan Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya dengan melibatkan sejumlah aturan yaitu Standar Akuntansi Pemerintah sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan dimana Pemerintah Daerah mampu menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat yang memenuhi syarat keterandalan yaitu penyajian jujur, dapat diverifikasi dan netralitas.

Aspek pengelolaan keuangan menjadi ranah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan keuangan daerah termasuk unsur dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah suatu pemda yang tidak dapat dipisahkan sehingga diperlukan pengendalian serta pengawasan

yang baik agar tidak terjadi kecurangan (Sudarsana & Rahardjo, 2013). Di Indonesia, pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal ini berkaitan dengan salah satu hasil pemeriksaan BPK yakni pemeriksaan kinerja yang didalamnya ketersediaan opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara sukarela melalui *website* tergantung dari urgensi masing-masing pemerintah daerah, dengan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi ketersediaan informasi pada situs *website* pemerintah. Pertama yaitu opini audit. Opini audit adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum (Mulyadi, 2013).

Menurut (Prasasti et al., 2017), opini audit menyediakan informasi yang sesuai dengan pengguna informasi, dalam pemerintah sendiri wajib memahami kinerja, evaluasi, masyarakat serta investor untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Oleh sebab itu, opini audit menjadi salah satu indikator yang penting bagi kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. Jika terjadi penyimpangan yang ditemukan oleh BPK melalui pemeriksaannya, akan mempengaruhi ketersediaan laporan keuangan dan pemerintah daerah dengan ketetapan hasil audit yang buruk akan menyebabkan laporan keuangan belum tersedia di *website* resmi (Handayani, 2010). Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 opini audit menyatakan,

profesional auditor tentang keakuratan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Ketersediaan informasi laporan keuangan di *website* resmi pemerintah daerah yang dilihat berdasarkan informasi keuangan maupun non keuangan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) akan cenderung mengungkapkan ketersediaan informasi keuangan pemerintah daerah melalui internet untuk memberikan sinyal pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik dan bisa dipertanggung jawabkan (Agustina, U., 2017). Jika pemerintah daerah memperoleh opini audit selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan menimbulkan anggapan bahwasanya dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah terjadi penyimpangan, terjadi penyimpangan sehingga pemerintah daerah cenderung untuk menutupi informasi keuangan dari publik.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wau & Ratmono, 2015) dan (R. P. Nurhidayati & Rahayu, 2020) menunjukkan pengaruh *Internet Financial Reporting* (IFR) dengan memasukkan faktor opini audit dapat diperoleh hubungan positif terhadap ketersediaan informasi keuangan di internet dan menyatakan bahwa pemerintah akan memperlihatkan sinyal pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bertanggung jawab dengan mempublikasikan laporan keuangannya yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian di internet. Namun pada penelitian (Rahayu et al., 2021) hal ini tidak sejalan dengan hasil yang diperoleh karena hasil audit tidak memiliki

hubungan signifikan terhadap transparansi keuangan daerah melalui *website* resmi pemerintah daerah.

Selanjutnya (N. L. Khasanah & Rahardjo, 2014) menunjukkan bahwa jumlah temuan audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketersediaan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan audit merupakan kumpulan informasi dan fakta mengenai situasi yang telah diperiksa dan dianalisis terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada laporan keuangan pemerintah daerah (ISO 9000:2008). Apabila Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak hal yang tidak wajar saat menginspeksi laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut dianggap tidak memadai. Apabila situasi semacam ini terwujud, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan dengan cepat meminta pemerintah daerah tersebut untuk memperbaiki dan meningkatkan tingkat keterbukaan sebagai langkah perbaikan terhadap ketersediaan laporan keuangan yang dipresentasikan. Hal ini menunjukkan bahwa temuan audit memiliki dampak yang menguntungkan dan penting terhadap tingkat ketersediaan laporan keuangan pemerintah daerah di *website* (Kinerja & Tengah, 2022). Dengan banyaknya temuan audit, pemda menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dengan melakukan koreksi dalam upaya meningkatkan pengungkapan pelaporan keuangan.

Penelitian sebelumnya terkait variabel temuan audit yaitu (Liestiani, 2008) menunjukkan bahwa jumlah temuan audit dan nilai temuan sebagai salah satu yang mempengaruhi pengungkapan. Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan laporan keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan positif dengan jumlah temuan audit. Hal ini membuktikan teori yang mengatakan bahwa pemerintah daerah akan memenuhi rekomendasi yang diberikan oleh BPK untuk melakukan perbaikan yang meningkatkan pengungkapan pada laporan keuangannya (Saputra, 2012). Sebaiknya, nilai temuan memiliki hubungan negative dengan pengungkapan laporan keuangan daerah. Hasil ini membuktikan hipotesis yang dibuat yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat penyimpangan, maka pemerintah daerah cenderung untuk menutupi penyimpangan tersebut, maka tingkat ketersediaan laporan keuangan untuk di akses di *website* menjadi rendah.

Selanjutnya menurut penelitian (Laporan & Pemerintah, n.d.) menjelaskan bahwa jumlah temuan audit tidak berdampak signifikan bagi tingkat ketersediaan karena jumlah temuan audit BPK tidak serta merta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan lebih besar. Dalam terjadinya pertentangan atas hasil penelitian, dan adanya ketidakkonsistenan hasil atas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketersediaan laporan keuangan, serta telah munculnya peraturan baru tentang Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010, maka dibutuhkan penelitian lanjutan guna menguji ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut.

Kemudian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK wajib dilakukan dengan menunjukkan ketersediaan dari hasil kajian efektif jika rekomendasi dilaksanakan oleh pimpinan entitas yang diperiksa (Dwiputrianti, 2008).

Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Pengambilan keputusan dapat menghentikan dan mencegah terulangnya kesalahan, penyimpangan, kecurangan dan pemborosan dengan masukan dari auditor (Umar, 2012). Koreksi pasca audit merupakan bentuk pertanggungjawaban kementerian/lembaga atas kesalahan dalam pertanggungjawaban keuangan publik (Liu & Lin, 2012).

Di samping itu, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan terhadap peraturan resmi, selain itu mereka juga bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara dan mengawasi hasil dari pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Periksa Keuangan (BPK) (Dasar et al., 1945). Kecepatan pemerintah daerah dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang di audit bertentangan pada keinginan untuk mengungkapkan ketersediaan pelaporan keuangan di *website* pemerintah, sebagai upaya perbaikan pemerintah daerah dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Masyitoh 2014), hal ini menunjukkan bahwa semakin luas pengawasan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, semakin lemah persepsi korupsi yang ada. Pada laporan hasil pemeriksaan dimana BPK masih menemukan sejumlah masalah dalam pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan diminta untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait temuan audit sebagai bentuk

tingkat penyajian dalam ketersediaan informasi pada pemerintah daerah kepada laporan keuangan (Ridwan & Yahya, 2020).

Meninjau dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kembali dan menguji lebih lanjut faktor yang mengendalikan ketersediaan informasi pada web resmi pemerintah daerah. Penelitian ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mengetahui peran ketepatan waktu dalam ketersediaan laporan keuangan di *website* yang berkualitas dan perkembangan *e-government* di Indonesia. Penelitian ini juga akan memfokuskan meneliti laporan keuangan pemda kabupaten/kota di Indonesia yang terdapat dalam badan pemeriksa keuangan (BPK). Penelitian ini memakai data yaitu pada tahun 2021, ketika penggunaan komunikasi data meningkat pesat. Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) tahun 2010 pada (Liqoana, 2016) menjelaskan bahwa konten *website* pemda minimal harus menampilkan sekilas pemerintah daerah, berita serta forum diskusi, dan saran/komentar.

Dari penjelasan diatas perbedaan penelitian sebelumnya adalah peneliti memperluas sampel penelitian oleh (Fatmawati et al., 2019) dengan sampel penelitian kabupaten/kota di Pulau Jawa menjadi seluruh kabupaten/kota di Indonesia, hal ini dimaksudkan agar lebih representatif atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan tambahan variabel independen yaitu variabel opini audit dan perbedaan waktu dalam penelitian serta kondisi karakteristik masing-masing di pemerintah daerah. Variabel opini audit sebagai hasil salah satu

pemeriksaan oleh BPK yang menunjukkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah (Pauli, 2015). Perolehan opini audit dari BPK RI berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mengisyaratkan kinerja pemerintah daerah yang baik.

Penelitian ini menggunakan tahun 2021 untuk melihat pengaruh opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan laporan keuangan. Hal ini karena laporan keuangan audit setiap periode kemudian diterbitkan pada tahun berikutnya. Penggunaan periode penelitian tahun 2021 disebabkan karena adanya batasan perolehan data untuk menguji variabel ketersediaan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang pentingnya ketersediaan laporan keuangan pemerintah daerah di situs *website* serta memberikan saran seperti faktor-faktor yang mempengaruhi agar hasil ketersediaan laporan keuangan secara sukarela dapat terwujud, pada *website* pemerintah daerah dengan sifat tanggung jawab dan good government governance dapat dilaksanakan. Karena itu, berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai **“Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan di Situs Website Pemerintah Daerah (studi pemerintah daerah kabupaten/kota se Indonesia tahun 2021)”**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh opini audit terhadap ketersediaan laporan keuangan di situs *website* pemerintah daerah di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh temuan audit terhadap ketersediaan laporan keuangan di situs *website* pemerintah daerah di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh tindaklanjut hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan laporan keuangan disitus *website* pemerintah daerah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia dan sejauh mana pengaruhnya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah memberikan masukan yang bermanfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta wawasan dorongan ke arah yang lebih baik, mampu meningkatkan pemahaman dan menyadari pentingnya penyajian terkait dengan

pengaruh terhadap ketersediaan laporan keuangan di situs *website*. Selain itu, bagi penelitian lain dapat disajikan bahan perbandingan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat pemikiran kepada :

- a. Bagi akademisi sebagai bahan referensi dalam penelitian berikutnya, dan penelitian diperlukan dapat membagikan tambahan serta referensi bagi peneliti lain yang tertarik dengan keahlian dalam penelitian ini.
- b. Bagi pemerintah pusat sebagai pengguna standar akuntansi pemerintah, sebaiknya hasil penelitian ini disajikan sebagai acuan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan.
- c. Bagi pemerintah daerah sebagai pengguna standar akuntansi publik, hasil penelitian ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akuntansi untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.
- d. Bagi Masyarakat

Peneliti mengharapkan hasil penelitian bisa memberikan manfaat bagi masyarakat mengenai bagaimana hasil dari pemeriksaan yang dilaksanakan pihak BPK RI dan juga dapat menambah minat masyarakat untuk mempelajari system akuntansi dan teknologi.